TANTANGAN HUKUM DAN KEABSAHAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Septiara Elvionita^a, Moulyta Elgi Trinanda^a, Raesitha Zildjianda^a

^a *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: septiaraelvionita@fh.unsri.ac.id,
moulytaelgitrinanda@fh.unsri.ac.id, raesithazildjianda@fh.unsri.ac.id*

Naskah diterima: 13 Maret; revisi: 12 Mei ; disetujui: 28 Mei 2025

DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4830

Abstrak:

Di Indonesia, regulasi tentang perkawinan menetapkan ketentuan mengenai syarat sah perkawinan dan prosedur administratifnya. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan media digital yang semakin meluas, muncul fenomena baru dalam ranah perkawinan. Perkawinan di era digital menghadirkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan serta pengaturan perkawinan yang dilaksanakan melalui platform digital atau aplikasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perkawinan yang dilakukan secara *daring* atau melalui aplikasi semakin banyak dijumpai, yang menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukumnya dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul terkait dengan keabsahan perkawinan digital serta pentingnya pembaruan regulasi guna mendukung perkawinan yang dilaksanakan melalui media digital. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul, seperti isu identitas, bukti keabsahan perkawinan, dan perlindungan hak-hak pasangan yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen hukum, serta literatur yang relevan guna memberikan solusi terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh perkawinan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam proses perkawinan, keabsahan perkawinan secara digital masih memerlukan penyesuaian dalam tatanan hukum agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Kata Kunci: Tantangan Hukum; Keabsahan Perkawinan; Era Digital; Hukum Positif

Abstract:

In Indonesia, marriage regulations stipulate the requirements for a valid marriage and its administrative procedures. However, with the rapid development of technology and the increasing use of digital media, a new phenomenon has emerged in the realm of marriage. Marriage in the digital era presents various legal issues, especially regarding the validity and regulation of marriages carried out through digital platforms or applications. Along with the rapid development of technology, marriages conducted online or through applications are increasingly common, which raises questions regarding their legal validity within the framework of positive Indonesian law. This study aims to analyze the legal challenges related to the validity of digital marriages and the importance of regulatory updates to support marriages carried out through digital media. In addition, this study also identifies potential problems that may arise, such as identity issues, proof of the validity of the marriage, and protection of the rights of the couples involved. The method used in this study is a normative approach with legal

analysis, namely by studying applicable laws and regulations, legal documents, and relevant literature to provide solutions to the legal challenges faced by digital marriages. The study results show that although technology makes the marriage process more manageable, the validity of digital marriages still requires adjustments in the legal system to meet the demands of the times and ensure the protection of individual rights.

Keywords: *Legal Challenges; Validity of Marriage; Digital Era; Positive Law*

LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah kesatuan lahiriah dan batiniah antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia serta abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Di Indonesia, regulasi tentang perkawinan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan ketentuan mengenai syarat sah perkawinan dan prosedur administratifnya. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan media digital yang semakin meluas, muncul fenomena baru dalam ranah perkawinan, yaitu perkawinan yang dilaksanakan secara *daring* (online) melalui *platform* atau aplikasi.

Digitalisasi dalam perkawinan memberikan peluang efisiensi, terutama dalam kondisi luar biasa seperti pandemi COVID-19. Namun, ia juga menimbulkan tantangan yang cukup kompleks, baik dari segi hukum agama, administrasi negara, maupun perlindungan hukum terhadap hak-hak suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.² Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum yang cukup besar. Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi seperti keabsahan di dalam hukum perkawinan yang dilakukan secara *daring* (online). Walaupun teknologi menyediakan kemudahan dan memperbesar peluang akses bagi individu untuk melangsungkan perkawinan, penerimaan terhadap bentuk perkawinan ini dalam sistem hukum Indonesia masih belum jelas. Ketidajelasan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik perkawinan modern yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi.

Selain itu, terdapat sejumlah permasalahan hukum yang berpotensi muncul akibat adanya praktik perkawinan secara *daring* (online), seperti isu identitas pasangan, bukti sahnya perkawinan, dan perlindungan atas hak-hak pasangan suami istri secara *daring* (online). Sehubungan dengan hal tersebut, sangat penting untuk melakukan kajian lebih lanjut bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan merespon fenomena ini, serta untuk mengevaluasi apakah diperlukan pembaruan atau penyesuaian regulasi guna mengakomodasi praktik perkawinan di era digital.

Dengan alasan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk meninjau tantangan serta keabsahan perkawinan secara *daring* (online) dalam kerangka hukum positif di Indonesia dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang berkembang seiring dengan berkembangnya kegiatan tersebut. Modifikasi peraturan yang cukup melindungi pasangan suami istri melalui media digital merupakan tujuan penting lainnya dari penelitian ini. Kurangnya undang-undang khusus yang mengatur hal ini menciptakan kebingungan hukum bagi mereka yang berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan secara *daring* (online), oleh karena itu hal ini menjadi semakin penting. Legalitas proses perkawinan secara *daring* (online) penting untuk dikaji. Faktanya sampai sekerang, belum terdapat aturan spesifik dalam peraturan di Indonesia yang secara tegas menetapkan aturan tentang perkawinan secara *daring* (online). Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakjelasan hukum terhadap warga negara yang menjalani perkawinan dengan cara tersebut.

¹ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ” (t.t.).

² Arvita Hastarini, “Keabsahan Ijab Qabul Dalam PerKawInan secara OnlIne (DarIng) Dalam PersPeKtif huKum: ImPIIKasI PanDemI cOVID-19,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.220>.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang merupakan penelitian hukum dengan fokus utama pada studi pustaka (*library research*).³ Jenis penelitian hukum yang diterapkan pada kajian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada asas-asas hukum dan sistematika hukum. Sasaran dari penelitian hukum ini yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen hukum, dan literatur yang relevan guna⁴ menemukan solusi atas tantangan dan keabsahan hukum yang dihadapi oleh perkawinan secara *daring* (online).

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber data sekunder mencakup hasil penelitian sebelumnya, buku-buku yang berkaitan dengan topik perkawinan, serta pandangan pakar hukum dan agama yang relevan dengan pembahasan.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian, terdiri dari:
 - a. UUD NRI 1945;
 - b. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019; dan
 - c. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menyajikan penjabaran tentang bahan hukum primer serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Bahan ini meliputi buku referensi, jurnal, dan karya ilmiah yang mendukung.
3. Bahan Hukum Tersier merujuk pada bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti sumber dari internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Semua informasi yang diperoleh oleh penulis dianalisis sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

ANALISIS DAN DISKUSI

Tantangan Hukum Perkawinan secara *Daring* (Online) Menurut Hukum Positif Indonesia

Di era digital yang semakin maju, berbagai aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan besar, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan. Salah satu fenomena yang berkembang adalah perkawinan secara *daring* (online), di mana prosesi akad nikah atau pemberkatan dilaksanakan melalui *platform* digital. Teknologi yang mudah diakses memungkinkan pasangan, terutama yang terpisah oleh jarak geografis, untuk menikah tanpa perlu bertemu secara langsung.⁵ Namun, meskipun terlihat praktis dan sesuai dengan tuntutan zaman, perkawinan secara *daring* (online) menghadapi sejumlah tantangan sistem hukum Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta pelaksanaannya, Indonesia menegaskan adapun perkawinan tidak sebatas merupakan ikatan pribadi antara dua individu, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, agama, dan social.

³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 25

⁴ Zainuddin, hal 25

⁵ Ahmad jurnal AL FUADIY, 2024, Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 06 No. 02.

Tantangan ini semakin kompleks mengingat keberagaman agama di Indonesia, yang masing-masing memiliki persyaratan khusus terkait keabsahan sebuah perkawinan. Sebaliknya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bahkan belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, sehingga menimbulkan celah hukum dan keraguan dalam pelaksanaannya. Berikut hambatan hukum yang ditemui dalam pelaksanaan hukum perkawinan secara *daring* (online) di Indonesia:

1. Keterbatasan Regulasi yang Ada

Sampai sekarang, Indonesia belum menetapkan regulasi secara jelas dan tegas terkait perkawinan secara *daring* (online). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang melandasi regulasi perkawinan, akantetapi tidak memuat norma yang memungkinkan adanya perkawinan jarak jauh yang dilaksanakan menggunakan platform digital. Dalam pasal-pasal UU tersebut, perkawinan diatur dalam konteks fisik yang melibatkan kehadiran pasangan dan saksi-saksi di tempat yang sama. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dan keraguan mengenai sah tidaknya perkawinan yang dilakukan secara *daring*.

Penting untuk dicatat bahwa UU Perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya kesaksian terhadap perkawinan, di mana saksi-saksi tersebut harus berada di tempat yang sama dengan pasangan pengantin pada saat perkawinan dilangsungkan. Sementara itu, dalam praktik perkawinan secara *daring* (online), syarat kehadiran fisik ini menjadi sulit dipenuhi.

2. Legalitas Perkawinan Daring di Indonesia

Perkawinan adalah institusi hukum yang penting dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia, aspek hukum terkait perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan syarat dan prosedur sahnya sebuah perkawinan. Perkawinan di Indonesia umumnya dilaksanakan secara langsung dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang⁶, yaitu perkawinan bagi penganut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi penganut agama selain Islam diadakan di Kantor Catatan Sipil. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi, munculnya perkawinan *daring* yang memungkinkan pasangan untuk menikah tanpa bertatap muka langsung menjadi masalah baru yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan ini. Perkawinan *daring* yang dilangsungkan melalui platform digital atau media komunikasi jarak jauh seperti *video call*, memungkinkan pasangan untuk menikah tanpa perlu berada di tempat yang sama secara fisik.⁷ Namun, UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur prosedur ini. Selain itu, muncul pula masalah terkait saksi, dokumen pernikahan, dan tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perkawinan *daring*, yang tidak diuraikan secara detail dalam undang-undang ini.⁸

Undang-Undang Perkawinan dan Ketidaksiuaian dengan Perkawinan Daring
Ketentuan hukum mengenai perkawinan di Indonesia secara umum merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan utamanya. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini, disebutkan bahwa

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh pejabat yang berwenang”*⁸

Sesuai dengan ketentuan tersebut, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan secara langsung di hadapan pejabat yang berwenang, yakni pegawai pencatat nikah di KUA bagi umat Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi pemeluk agama selain Islam. Selanjutnya,

⁶ M. Syamsudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁷ Stai Miftahul, Ulum Tarate, dan Pandian Sumenep, “TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM ERA DIGITAL: KAJIAN TERHADAP NIKAH ONLINE DAN VALIDITAS HUKUMNYA NURUL HUUDA,” vol. 1, 2025.

⁸“Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ” (t.t)

Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.14 No.1 Mei 2025

Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan wajib dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah prosesi perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak.⁹ Keberadaan fisik pasangan di tempat tersebut adalah syarat wajib, karena dalam praktiknya, seluruh rangkaian acara perkawinan, termasuk saksi dan penandatanganan dokumen, dilakukan di tempat tersebut.

Namun, dalam perkawinan daring tidak mencakup kehadiran fisik tersebut. Oleh karena itu, UU Perkawinan tidak dapat langsung diterapkan pada situasi di mana pasangan menikah tanpa bertatap muka langsung. Tanpa adanya ketentuan khusus yang mengatur hal ini, timbul ketidakpastian hukum mengenai sahnya perkawinan daring.

a. Masalah Pengakuan Saksi dalam Perkawinan Daring

Saksi adalah elemen penting dalam perkawinan yang sah di Indonesia. Pasal 14 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

*"Pencatatan perkawinan dilakukan dengan menghadirkan dua orang saksi yang sah menurut hukum"*¹⁰

Dalam konteks perkawinan daring, masalah utama yang muncul adalah pengakuan terhadap saksi yang berada di lokasi terpisah dari pasangannya. Dalam perkawinan yang dilakukan secara langsung, saksi harus berada di lokasi yang sama dengan pasangan yang menikah dan pejabat pencatat perkawinan. Namun, pada perkawinan daring, saksi dapat hadir melalui media komunikasi seperti video call atau platform daring lainnya, yang menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan saksi yang tidak hadir secara fisik.

Kehadiran fisik saksi merupakan unsur mendasar dalam proses pencatatan perkawinan karena saksi dipandang sebagai pihak yang menjamin bahwa perkawinan tersebut sah. Dengan demikian, kehadiran saksi secara virtual masih dipertanyakan keabsahannya menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, mengingat Undang-Undang Perkawinan belum memberikan ketentuan yang jelas terkait hal tersebut. Kondisi ini memperkuat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan secara daring.¹¹

b. Tanda Tangan dan Dokumen Elektronik dalam Perkawinan Daring

Selain masalah saksi, terdapat juga tantangan terkait dengan dokumen pernikahan dan tanda tangan elektronik dalam perkawinan daring. Dalam perkawinan yang dilakukan secara langsung, kedua pasangan pengantin harus menandatangani dokumen perkawinan di hadapan pejabat yang berwenang. Namun, dalam konteks perkawinan daring, penggunaan tanda tangan elektronik seringkali menjadi solusi untuk memvalidasi dokumen.¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang tanda tangan elektronik dan keabsahannya dalam transaksi elektronik. Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa:¹³

"Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan yang ditulis tangan pada dokumen konvensional apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini."

⁹ Irma Istihara Zain, "Unizar Recht Journal Perlindungan Hukum Terhadap konsumen dalam Transaksi digital melalui aplikasi dana Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Legal Protection of consumers in Digital transactions through fund applications Based on Positive Law in Indonesia rahmat alamsyah," t.t., www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumendala-e-commerce/.

¹⁰ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (t.t.).

¹¹ Hasbi Ash-Shiddlegy, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

¹² Togar dkk., "Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital Ulil Amri Insan Kamil," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 841–47, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.312>.

¹³ "Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (t.t.).

Namun, UU ITE ini lebih dikhususkan untuk transaksi komersial dan kontrak elektronik yang bersifat bisnis, dan tidak mengatur secara spesifik tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam pernikahan. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik dalam dokumen pernikahan daring masih menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya di mata hukum.

c. Ketidakpastian Hukum dan Perlu Adanya Regulasi Khusus

Hingga saat ini, Undang-Undang Perkawinan tidak mencakup pengaturan khusus mengenai perkawinan daring. Ketidakpastian hukum ini menciptakan tantangan bagi pasangan yang ingin menikah secara daring, terutama terkait dengan pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut. Meskipun beberapa negara sudah mengadopsi regulasi yang lebih fleksibel mengenai perkawinan daring, Indonesia belum memiliki kebijakan atau aturan yang tegas tentang hal ini.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi baru yang mengatur tentang perkawinan daring di Indonesia. Regulasi tersebut harus mencakup ketentuan yang lebih jelas tentang keabsahan saksi yang hadir secara virtual, tanda tangan elektronik, dan pencatatan perkawinan daring.¹⁴ Hal ini akan membantu memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang memilih untuk menikah secara daring, serta memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui oleh negara.

Pembaruan regulasi ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan peraturan pelaksana yang mengatur prosedur dan persyaratan perkawinan daring, atau bahkan dengan reformasi dalam UU Perkawinan itu sendiri. Harapan besar tercipta dengan diterapkannya regulasi yang lebih jelas dan lengkap, sehingga sistem hukum Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk dalam konteks perkawinan daring.

3. Kesesuaian dengan Prinsip Kewenangan Pengadilan atau Pencatatan Negara dalam Perkawinan Daring

Prinsip kewenangan pengadilan atau pencatatan negara merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang mengatur prosedur sahnya perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia bergantung pada pelaksanaannya yang harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan dan dicatat oleh pejabat yang berwenang, yaitu oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan beragama Islam, dan oleh pejabat di Kantor Catatan Sipil bagi pasangan yang menganut agama selain Islam. Untuk itu, pencatatan perkawinan adalah langkah penting yang memberikan kekuatan hukum dan pengakuan negara terhadap sebuah perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), salah satu syarat sah perkawinan adalah pencatatannya di hadapan pejabat yang berwenang, yang memerlukan kehadiran fisik pasangan di tempat pencatatan tersebut, baik di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil.

Namun, dengan berkembangnya teknologi digital, muncul fenomena baru dalam perkawinan daring, yang memungkinkan pasangan menikah tanpa perlu hadir secara fisik di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Hal ini menjadi isu yang cukup kompleks, karena tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur perkawinan daring dalam Undang-Undang Perkawinan yang ada. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia, dalam beberapa kondisi tertentu seperti pandemi COVID-19, telah mengizinkan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi prosedur hukum secara daring, termasuk perkawinan. Namun,

¹⁴ Stai Miftahul, Ulum Tarate, dan Pandian Sumenep, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Era Digital: Telaah Kritis Terhadap Validitas Nikah Online Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Mas Odi," vol. 1, 2025, <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu>.

pertanyaan besar muncul mengenai apakah mekanisme yang ada saat ini sudah memadai untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pencatatan perkawinan dan apakah hal ini sesuai dengan prinsip kewenangan negara dalam pencatatan perkawinan yang sah.

a. Prinsip Kewenangan Pencatatan Negara dalam Perkawinan

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan aspek penting yang diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengharuskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Menurut ketentuan ini, pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu pegawai pencatat perkawinan di KUA bagi pasangan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-Muslim. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut dan memastikan bahwa perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah. Kehadiran fisik pasangan di hadapan pejabat yang berwenang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.¹⁵ Prinsip kewenangan negara dalam pencatatan ini juga mengandung makna bahwa negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur dan mengakui perkawinan, sehingga menciptakan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah dan keturunan mereka.

b. Tantangan Terhadap Prosedur yang Ada

Perkawinan secara daring, yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video call atau platform daring lainnya, menggeser prosedur yang selama ini mengharuskan kehadiran fisik pasangan di hadapan petugas pencatat perkawinan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar mengenai kesesuaian prinsip kewenangan pencatatan negara dengan pelaksanaan perkawinan daring, yang memungkinkan pasangan menikah tanpa berada di tempat yang sama atau bertatap muka langsung dengan pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya, kehadiran fisik pasangan pengantin di hadapan pejabat pencatatan perkawinan merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Kehadiran fisik ini memiliki tujuan untuk menjamin keabsahan dan kesahan dari perkawinan yang dilakukan, serta untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat administratif yang ditetapkan oleh negara. Tanpa adanya kehadiran fisik, terdapat kekhawatiran mengenai keaslian identitas pasangan, terjadinya penipuan, atau bahkan kesalahan dalam pencatatan perkawinan.

Namun, dengan adanya perkawinan daring, di mana pasangan dapat menikah tanpa perlu hadir di tempat yang sama, negara dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan prosedur pencatatan agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi.¹⁶ Meskipun terdapat kebijakan darurat selama pandemi COVID-19 yang mengizinkan pernikahan virtual melalui platform daring tertentu, hal ini tidak diatur secara permanen dalam perundang-undangan yang ada.

c. Respons Negara terhadap Perkawinan Daring dalam Kondisi Tertentu

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan khusus yang

¹⁵ Firman Floranta Adonara dan Citra Santyaningtyas, "KEWENANGAN NOTARIS MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* ■ 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1864>.

¹⁶ Hastarini, "Keabsahan Ijab Qabul Dalam PerKawInan secara OnlIne (DarIng) Dalam PersPeKtif huKum: ImPIIKasI PanDemI cOVID-19."

memperbolehkan penggunaan teknologi dalam pencatatan perkawinan. Salah satu kebijakan yang diterbitkan adalah memperbolehkan pencatatan perkawinan secara daring di KUA untuk pasangan pengantin yang tidak dapat hadir secara fisik akibat pembatasan sosial atau alasan lainnya. Kebijakan ini sempat berlaku sebagai solusi untuk menjaga kelangsungan prosedur perkawinan selama masa pandemi, mengingat adanya pembatasan fisik yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Hal ini menandakan bahwa dalam situasi darurat, negara bersedia untuk menyesuaikan prosedur hukum demi memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷

Namun, meskipun kebijakan tersebut diterapkan dalam konteks darurat, pertanyaan besar tetap muncul: Apakah sistem pencatatan daring ini dapat dijadikan sebagai mekanisme permanen dalam sistem hukum Indonesia? Hal ini berhubungan dengan kesesuaian prinsip kewenangan negara yang selama ini menuntut kehadiran fisik dalam setiap proses hukum yang terkait dengan perkawinan.

d. Perlunya Reformasi Hukum dalam Pencatatan Perkawinan Daring

Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi khusus yang mengatur tentang perkawinan daring secara permanen, sehingga sistem pencatatan perkawinan di Indonesia dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengurangi kekuatan hukum perkawinan tersebut. Reformasi hukum ini dapat meliputi beberapa aspek, antara lain:

- 1) Penerimaan saksi secara virtual dalam perkawinan daring, dengan mekanisme yang memastikan bahwa saksi tetap bisa memberikan validitas terhadap proses pernikahan.
- 2) Penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dalam dokumen perkawinan untuk menggantikan tanda tangan manual.
- 3) Pencatatan perkawinan secara daring yang dapat dilakukan dengan prosedur yang tetap mengacu pada prinsip kewenangan negara, namun lebih fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi.¹⁸

Jika peraturan ini diterapkan dengan baik, maka perkawinan daring dapat tetap dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang diakui negara, tanpa mengurangi pengawasan negara terhadap validitas perkawinan.

4. Keabsahan Administratif dan Pencatatan Sipil

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan perkawinan secara *daring* adalah masalah pencatatan sipil. Dalam sistem hukum Indonesia, Pencatatan perkawinan memiliki peran mendasar untuk mengesahkan status legalitas pasangan suami istri. Biasanya, pasangan yang menikah di hadapan penghulu atau pejabat agama harus melapor ke kantor catatan sipil untuk mendapatkan buku nikah yang sah.

Namun, pencatatan perkawinan secara *daring* (online) masih menjadi masalah besar. Hingga saat ini, proses administrasi di beberapa instansi pemerintah dan lembaga agama tidak sepenuhnya mendukung perkawinan daring.¹⁹ Hal ini disebabkan karena pencatatan sipil umumnya mengutamakan kehadiran fisik para pihak yang menikah, serta bukti sah yang disampaikan secara langsung, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun tanda tangan.

Beberapa wilayah di Indonesia bahkan masih belum memiliki sistem digitalisasi yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan perkawinan secara *daring* (online) dan pencatatannya secara resmi. Karena hal tersebut, para pihak yang melaksanakan perkawinan

¹⁷ M Ridho Ramadhani dan Hendri Sayuti, "PERNIKAHAN VIA ONLINE DAN PROBLEMATIKANYA," *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2025).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

daring mungkin tidak mendapatkan akta nikah atau buku nikah yang diakui secara hukum, meskipun mereka sudah melangsungkan pernikahan secara *daring* (online).

5. Potensi Penipuan dan Penyalahgunaan dalam Perkawinan Daring (Online)

Seiring dengan perkembangan teknologi, perkawinan daring atau yang sering disebut pernikahan online menjadi semakin populer, terutama dengan adanya kondisi yang mengharuskan pembatasan sosial fisik, seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Namun, dengan kemajuan teknologi ini, muncul pula berbagai potensi risiko yang dapat disalahgunakan, salah satunya adalah penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks perkawinan, penipuan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yang berpotensi merugikan pihak yang terlibat, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum.

Perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan adanya kehadiran fisik dari pasangan yang menikah di hadapan pejabat yang berwenang, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam maupun di Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-Muslim. Kehadiran fisik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkawinan benar-benar sah dan memenuhi syarat administratif yang berlaku. Namun, dalam perkawinan daring, ketentuan ini menjadi sulit untuk diterapkan, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan sistem dan penipuan²⁰

Penipuan dalam perkawinan daring dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan potensi penyalahgunaannya sangat besar, mengingat ketidakhadiran fisik pasangan dalam proses tersebut. Beberapa jenis penipuan yang berpotensi terjadi dalam perkawinan daring adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan untuk Mendapatkan Keuntungan Ekonomi atau Status Hukum Tertentu
Salah satu bentuk penipuan yang dapat terjadi adalah pernikahan yang dilakukan untuk tujuan ekonomi atau mendapatkan status hukum tertentu. Sebagai contoh, perkawinan palsu bisa dilakukan untuk memperoleh keuntungan seperti:

- 1) Mendapatkan kewarganegaraan

Salah satu pihak mungkin menikah dengan tujuan memperoleh kewarganegaraan atau hak tinggal di negara tertentu. Dalam hal ini, seseorang dapat menikahi pihak lain secara daring untuk memperoleh visa atau status imigrasi tanpa niat untuk menjalani pernikahan secara sah.

- 2) Mendapatkan warisan atau harta

Perkawinan bisa dijadikan alat untuk memperoleh akses ke warisan, properti, atau harta milik pasangan yang lebih kaya atau memiliki aset yang lebih banyak. Dalam hal ini, penipu mungkin berpura-pura menikah secara daring dengan pasangan yang lebih mapan secara finansial untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

- 3) Status hukum atau tunjangan sosial

Ada kemungkinan bahwa pernikahan daring digunakan untuk memperoleh tunjangan sosial, seperti tunjangan keluarga, atau hak-hak lainnya yang diberikan oleh negara, tanpa ada niat tulus untuk membina rumah tangga.²¹

- b. Penipuan Identitas dan Penggunaan Data Pribadi yang Salah

Dalam perkawinan daring, verifikasi identitas pasangan menjadi lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan secara langsung di hadapan pejabat pencatatan perkawinan. Tidak adanya kehadiran fisik mengharuskan verifikasi identitas pasangan hanya mengandalkan dokumen atau informasi yang diserahkan secara elektronik. Hal ini membuka potensi penyalahgunaan dan penipuan identitas, seperti:

²⁰Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Erna Priliyasi, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (28 November 2019): 1–27, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>.

1) Menyamar sebagai orang lain

Salah satu pihak bisa saja menggunakan identitas palsu untuk menikah dengan pasangan yang sebenarnya tidak mereka kenal atau tidak mereka maksudkan untuk menikahi. Ini bisa terjadi, misalnya, melalui penggunaan foto palsu atau dokumen yang dipalsukan.

2) Kehilangan privasi atau pengambilan data pribadi secara ilegal

Pihak yang berniat jahat bisa memanfaatkan data pribadi yang diperoleh melalui platform daring untuk tujuan lain yang merugikan. Data pribadi yang diserahkan dalam proses pernikahan daring bisa disalahgunakan untuk penipuan lebih lanjut atau bahkan kejahatan lainnya, seperti pencurian identitas.

c. Perkawinan Palsu untuk Menghindari Kewajiban Hukum

Dalam beberapa kasus, seseorang bisa menggunakan perkawinan daring untuk menghindari tanggung jawab hukum, seperti pembayaran nafkah atau kewajiban lain dalam perkawinan yang sah. Misalnya, seseorang yang memiliki tanggungan hutang atau kewajiban hukum lainnya mungkin menikah secara daring untuk menghindari tanggung jawab terhadap pasangannya. Hal ini bisa merugikan pihak lain yang terlibat karena mereka tidak dapat mengakses mekanisme hukum yang sah untuk melindungi hak-hak mereka.

d. Kesulitan dalam Verifikasi dan Pengawasan Pihak-Pihak yang Terlibat

Salah satu aspek utama dalam perkawinan adalah adanya pengawasan negara melalui kehadiran fisik pasangan di hadapan pejabat pencatatan pernikahan. Kehadiran fisik ini memastikan bahwa pernikahan yang terjadi adalah antara dua orang yang sah dan saling setuju untuk menikah. Dalam perkawinan daring, proses verifikasi identitas menjadi jauh lebih rumit, karena:

- 1) Ketidakhadiran fisik pasangan menyulitkan pejabat yang berwenang untuk memeriksa kesesuaian dokumen dan memastikan bahwa tidak ada penipuan identitas.
- 2) Platform daring yang digunakan untuk perkawinan juga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi dokumen atau informasi yang diserahkan selama proses perkawinan.
- 3) Saksi yang hadir dalam perkawinan daring juga menghadapi tantangan dalam mengonfirmasi bahwa mereka adalah pihak yang benar-benar menyaksikan perkawinan tersebut dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan dalam proses perkawinan.²²

a) Kesulitan dalam Mengawasi Proses Perkawinan

Bila proses perkawinan dilakukan melalui video call atau platform daring lainnya, pengawasan terhadap proses pernikahan menjadi lebih sulit dilakukan. Dalam perkawinan yang dilakukan secara tatap muka, pengawas dari negara, seperti pegawai KUA atau pejabat Catatan Sipil, dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat adalah sah, dan tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan. Namun, dalam perkawinan daring, keterbatasan teknologi dapat mengurangi efektivitas pengawasan ini

b) Potensi Penyalahgunaan Sistem oleh Oknum Tertentu

Penyalahgunaan sistem perkawinan daring dapat terjadi, terutama ketika oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan kelemahan dalam sistem ini untuk

²² Zainul Erfan dkk., "Revitalisasi Dan Piloting Kantor Urusan Agama Di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (10 Juni 2024): 740–66, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.551>.

tujuan pribadi yang tidak baik. Beberapa bentuk penyalahgunaan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

- Penyalahgunaan platform daring
Platform yang digunakan untuk memfasilitasi perkawinan daring mungkin tidak memiliki sistem pengawasan atau verifikasi yang memadai untuk menjamin keabsahan pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Hal ini membuka kemungkinan bagi oknum untuk memanfaatkan sistem tersebut untuk melakukan penipuan atau eksploitasi terhadap pasangan yang kurang waspada.
- Manipulasi saksi dan bukti
Dalam perkawinan daring, sangat mungkin untuk melakukan manipulasi terhadap saksi atau bahkan memalsukan dokumen perkawinan. Tanpa adanya pengawasan fisik yang ketat, bukti dan kesaksian dapat dengan mudah dimanipulasi oleh oknum yang memiliki niat jahat.²³

6. Perlindungan atas Hak-hak Perempuan dan Anak

Salah satu *concern* utama dalam pelaksanaan perkawinan secara *daring* (online) adalah perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak. Pada sejumlah kasus, pasangan yang menikah secara *daring* mungkin mengalami masalah dalam pengakuan hak-hak mereka sebagai pasangan sah, terutama dalam perkara warisan, nafkah, serta lain yang diatur dalam hukum keluarga.

Selain itu, karena kurangnya pengawasan terhadap proses perkawinan daring, ada kekhawatiran bahwa pasangan perempuan, terutama yang terpaksa menikah dengan cara daring karena alasan tertentu (seperti perbedaan lokasi atau situasi darurat), mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.²⁴ Terdapat pula risiko terjadinya perkawinan anak yang dilakukan secara daring, yang seringkali sulit dipantau dan diawasi dengan benar oleh otoritas yang berwenang.

7. Keberagaman Pandangan Sosial dan Budaya

Sebagai negara yang memiliki berbagai suku, budaya serta agama, Indonesia memiliki pandangan beragam terhadap pelaksanaan perkawinan. Di beberapa daerah, terutama yang lebih konservatif, perkawinan secara daring mungkin tidak diterima karena dianggap bertentangan dengan norma sosial dan budaya setempat. Keterlibatan keluarga dalam pernikahan di Indonesia sangat penting, dan beberapa kalangan mungkin merasa bahwa pernikahan daring tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Selain itu, adat dan tradisi di beberapa daerah juga memainkan peran penting dalam sebuah pernikahan. Banyak adat yang mengharuskan pertemuan fisik, seperti prosesi pemberian mahar atau acara resepsi yang melibatkan banyak orang.²⁵ Ketika semua itu tidak dapat dilakukan dalam perkawinan secara daring (online), hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik adat dan cara pelaksanaan perkawinan yang lebih modern ini.

8. Keterbatasan Teknologi dan Akses Internet

Perkawinan secara *daring* tentu membutuhkan sarana teknologi yang cukup, seperti koneksi internet yang lancar dan perangkat yang kompatibel. Namun, di beberapa daerah Indonesia, terutama yang terletak di pedesaan atau wilayah yang kurang terjangkau, akses ke teknologi dan internet masih terbatas masih terbatas. Tentunya dapat menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan perkawinan daring yang sah dan terverifikasi.

²³ Abdur I Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, 1 ed. (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992).

²⁴ Abidin Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019).

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Ketergantungan pada teknologi juga memunculkan potensi gangguan teknis yang dapat menghambat jalannya prosesi perkawinan secara *daring* (online). Koneksi yang terputus atau perangkat yang tidak kompatibel dapat mengganggu kelancaran acara dan menyebabkan ketidakpastian dalam proses hukum perkawinan. Di Indonesia perkawinan secara daring (online) memiliki berbagai macam hambatan, mulai dari aspek legal hingga aspek sosial.²⁶ Dalam hal ini diperlukan aturan yang tegas yang mengatur keabsahan perkawinan secara daring (online), sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Keabsahan Perkawinan Secara Daring (Online) Menurut Hukum Positif Indonesia

Di dalam perkawinan apabila melengkapi seluruh rukun dan persyaratan yang ditentukan, maka dapat dinyatakan sah perkawinannya menurut pandangan hukum Islam. Unsur utama dalam suatu perkawinan meliputi keberadaan seorang pria dan wanita yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri, wali, serta dua orang saksi. Mengacu pada pandangan ini, rukun perkawinan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Calon Pengantin Pria
2. Calon Pengantin Wanita
3. Wali dari pihak Pengantin Wanita
4. Dua orang Saksi yang hadir
5. Ijab yang diucapkan oleh wali dan Qabul yang diucapkan oleh suami²⁸

Disamping rukun perkawinan tersebut, ada juga **syarat-syarat perkawinan**. Rukun ialah unsur utama dalam setiap tindakan yang diatur oleh hukum, di sisi lain syarat ialah unsur tambahan. Ada perbedaan antara rukun dan syarat perkawinan; rukun merupakan aspek-aspek yang melekat dalam perkawinan, antara lain kehadiran calon mempelai, wali, akad nikah, dan lain-lain. Perkawinan tersebut tidak dapat dianggap sah, apabila diantara rukun tersebut tidak dipenuhi. Syarat wajib ada dalam perkawinan, akan tetapi tidak termasuk dalam hakikatnya. Adapun syaratnya antara lain, syarat wali harus pria, baligh, berakal, dan lainnya.

Perkawinan di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini hanya mencakup pelaksanaan perkawinan secara tradisional sebagaimana yang lazim dilakukan di masyarakat. Sebaliknya, perkawinan yang dilakukan melalui media online masih merupakan fenomena baru dan tidak umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebab belum memiliki pengaturan tersendiri dalam undang-undang.

Penulis menganalisis isu ini dengan berpedoman pada ketentuan regulasi terkait perkawinan, terutama Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa perkawinan merupakan kesatuan lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, yang ditujukan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia serta abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan dilarang dilakukan dengan motif yang bertentangan dengan nilai moral, seperti hanya untuk memperoleh harta pasangan atau tujuan sementara yang tidak kekal.

Keabsahan suatu perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan diakui sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Pada ayat (2) menambahkan bahwa setiap

²⁶ Stai Miftahul, Ulum Tarate, dan Pandian Sumenep, "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM ERA DIGITAL: TELAHAH KRITIS TERHADAP VALIDITAS NIKAH ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN MAS ODI," vol. 1, 2025, <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu>.

²⁷ KN Sofyan Hasan, Hukum Keluarga dalam Islam (Malang: Setera Press, 2018), Hal 33

²⁸ Priliantika Ayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngenjok (Memberi Dodol) Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi Di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk keabsahan perkawinan, dua hal utama yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan sesuai agama atau kepercayaan masing-masing mempelai serta pencatatan di kantor urusan agama atau catatan sipil. Namun, melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan bukan penentu sahnya suatu perkawinan. Pencatatan tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak yang muncul akibat perkawinan tersebut.²⁹

Syarat perkawinan diatur dalam Bab 2 Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Pada ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan wajib berlandaskan pada persetujuan calon mempelai pria dan wanitanya. Jika salah satu atau keduanya belum berusia 21 tahun, maka wajib menerima izin dari orang tua sebagaimana diatur pada ayat (2). Izin tersebut dapat diberikan oleh wali atau keluarga dekat apabila orang tua telah wafat atau tidak memiliki kemampuan untuk menyatakan persetujuannya, sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan (4). Hal ini memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Pasal 7 Ayat (1) dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang telah direvisi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengatur batas umur untuk menyelenggarakan perkawinan. Dalam aturan sebelumnya, usia minimal perkawinan ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Setelah revisi, usia minimal untuk kedua calon mempelai menjadi 19 tahun agar perkawinan dinyatakan sah. Namun, apabila terdapat alasan khusus yang membutuhkan pengecualian dari ketentuan tersebut, dengan syarat persetujuan dari kedua orang tua mereka, pasangan memiliki hak untuk mengusulkan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat berwenang.

Ketentuan mengenai pelarangan perkawinan tertera dalam Pasal 8 huruf a, sampai dengan e, yang melarang perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah langsung (baik garis keturunan naik maupun turun), hubungan darah sampingan (misalnya saudara kandung, paman, atau kakek), hubungan semenda (seperti mertua, anak tiri, menantu, atau orang tua tiri), dan hubungan melalui susuan (misalnya antara anak susuan dan ibu susuan). Selain itu dalam perkawinan tidak diperbolehkan menikah lagi apabila pihak yang masih mempunyai ikatan, kecuali dalam situasi yang diatur secara khusus dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.³⁰

Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang diadakan secara *daring* dapat dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, selama memenuhi prinsip, yaitu bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, serta bebas dari larangan yang berlaku. Selain itu, calon mempelai memenuhi batas usia minimal 19 tahun dan mematuhi peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perkawinan *daring* dapat diakui secara resmi sah.

KESIMPULAN

Tantangan hukum perkawinan secara online menurut hukum positif Indonesia terletak pada kurangnya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan *daring*, meskipun perkembangan teknologi semakin meluas. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan persyaratan umum untuk perkawinan, keduanya tidak secara eksplisit mencakup perkawinan yang dilaksanakan secara *daring* (online). Tantangan ini mencakup masalah kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan, keabsahan

²⁹ Irma Istihara Zain, "Unizar Recht Journal Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi digital melalui aplikasi dana Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Legal Protection of consumers in Digital transactions through fund applications Based on Positive Law in Indonesia rahmat alamsyah," t.t., www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perindungan-konsumendala-e-commerce/.

³⁰ Togar dkk., "Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital Ulil Amri Insan Kamil," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 841–47, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.312>.

pelaksanaan akad nikah secara *daring* (online), dan kesesuaian dengan prinsip agama yang mengatur perkawinan.

Selain itu, ketidakpastian terkait pengawasan dan penegakan hukum dalam perkawinan secara *daring* (online) menjadi hambatan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut sah serta tidak disalahgunakan. Maka dari itu, dibutuhkan regulasi yang jelas serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi untuk mengakomodasi pelaksanaan perkawinan secara *daring* (online) yang diakui secara sah serta selaras dengan hukum negara maupun agama.

Keabsahan perkawinan dalam hukum positif Indonesia ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Tidak hanya itu, untuk memastikan adanya kepastian hukum, Perkawinan dimaksud wajib dicatatkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, untuk perkawinan yang dilaksanakan secara *daring*, keabsahannya tetap diakui selama tujuan perkawinan selaras dengan prinsip yang ditetapkan undang-undang, yakni guna membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Selain itu, perkawinan *daring* tidak boleh melanggar norma yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, termasuk persyaratan usia minimal yang harus dicapai oleh kedua mempelai adalah 19 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur I Rohman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. 1 ed. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992.
- Abidin Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Adonara, Firman Floranta, dan Citra Santyaningtyas. “KEWENANGAN NOTARIS MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1864>.
- Ahmad jurnal AL FUADIY, 2024, Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 06 No. 02.
- Erfan, Zainul, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, dan Fahmi Hamdi. “Revitalisasi Dan Piloting Kantor Urusan Agama Di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (10 Juni 2024): 740–66. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.551>.
- Erna Priliasari. “PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE.” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (28 November 2019): 1–27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>.
- Hasbi Ash-Shiddlegly. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Hastarini, Arvita. “Keabsahan Ijab Qabul Dalam PerKawInan secara OnlIne (DarIng) Dalam PersPeKtlf huKum: ImPliKasI PanDemI cOVID-19.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.220>.
- KN Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setera Press, 2018.
- M. Syamsudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Miftahul, Stai, Ulum Tarate, dan Pandian Sumenep. “REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM ERA DIGITAL: TELAHAH KRITIS TERHADAP VALIDITAS NIKAH ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN MAS ODI.” Vol. 1, 2025. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu>.

- . “TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM ERA DIGITAL: KAJIAN TERHADAP NIKAH ONLINE DAN VALIDITAS HUKUMNYA NURUL HUDA.” Vol. 1, 2025.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (t.t.).
- Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).
- Priyantika Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngenjok (Memberi Dodol) Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi Di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara).” UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ramadhani, M Ridho, dan Hendri Sayuti. “PERNIKAHAN VIA ONLINE DAN PROBLEMATIKANYA.” *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2025).
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Togar, , Polmanto Winfernando, Togar Polmanto Winfernando, dan Universitas Trunojoyo Madura. “Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital Ulil Amri Insan Kamil.” *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 841–47. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.312>.
- . “Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital Ulil Amri Insan Kamil.” *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 841–47. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.312>.
- Zain, Irma Istihara. “Unizar Recht Journal Perlindungan Hukum Terhadap konsumen dalam Transaksi digital melalui aplikasi dana Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Legal Protection of consumers in Digital transactions through fund applications Based on Positive Law in Indonesia rahmat alamsyah,” t.t. www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumendala-e-commerce/.
- . “Unizar Recht Journal Perlindungan Hukum Terhadap konsumen dalam Transaksi digital melalui aplikasi dana Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Legal Protection of consumers in Digital transactions through fund applications Based on Positive Law in Indonesia rahmat alamsyah,” t.t. www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumendala-e-commerce/.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.